

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAHAN (LAKIP) TAHUN 2021



**SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PADANG PARIAMAN
TAHUN 2022**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kepada ALLAH SWT, sehingga Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah (LAKIP) Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2021 dapat diselesaikan.

LAKIP Sekretariat DPRD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2021 merupakan laporan pertanggungjawaban tugas, wewenang dan sumber daya yang telah diberdayakan serta untuk mengetahui seberapa jauh keberhasilan dan kegagalan yang diperoleh dalam upaya pencapaian sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis Tahun 2016-2021, Rencana Kinerja Tahun 2021 Kabupaten Padang Pariaman. Dalam laporan ini diungkapkan seluruh aktifitas yang dilakukan oleh Sekretariat DPRD Kabupaten Padang Pariaman selama tahun 2021.

LAKIP tidak hanya sekedar Akuntabilitas, tetapi juga sebagai sarana yang strategis untuk mengevaluasi diri dalam rangka peningkatan kinerja kedepan. Dengan langkah ini setiap OPD dapat senantiasa melakukan perbaikan dalam mewujudkan praktek-praktek penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan meningkatkan kualitas pelayanan Publik.

Kami harapkan LAKIP ini, selain dapat memberikan manfaat sebagai media informasi bagi pihak – pihak yang berkepentingan dengan kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Padang Pariman, juga sekaligus dapat memberikan umpan balik bagi perbaikan kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Padang Pariaman dimasa yang akan datang.

Kami menyadari bahwa laporan Akuntabilitas Kinerja ini jauh dari sempurna, masukan berupa saran dan kritikan membangun sangat diperlukan, sehingga dapat memperbaiki dan meningkatkan Kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Padang Pariaman dimasa yang akan datang. Akhirnya, kami harapkan laporan ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Padang Pariaman, 07 Januari 2022


KHAIRUL NIZAM, S.Pi,MM
NIP. 19680909 199803 1 010



DAFTAR ISI

	KATA PENGANTAR	I
	DAFTAR ISI	Ii
	DAFTAR TABEL	Iii
BAB I	PENDAHULUAN	
	A. Gambaran Umum Sekretariat DPRD	1
	B. Permasalahan Utama	4
	C. Sistematika Pelaporan	5
BAB II	PERENCANAAN KINJERA	8
	A. Rencana Strategis 2016-2021	8
	B. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2021	11
	C. Perjanjian Kinerja Tahun 2021	12
BAB III	AKUNTABILITAS KINERJA	13
	A. Capaian Kinerja Sekretariat DPRD Tahun 2021	13
	B. Realisasi Anggaran Sekretariat DPRD Tahun 2021	31
BAB IV	PENUTUP	37
	A. Kesimpulan	37
	B. Langkah Kedepan	25
	C. Lampiran	26



DAFTAR TABEL

Gambar	Struktur Organisasi dan Tata Kerja	3
I.1	Sekretariat DPRD Kabupaten Padang Pariaman		
Tabel I.1	Struktur Jabatan Sekretariat DPRD	4
	Menurut Esselonering		
Tabel	Tujuan dan Sasaran Strategis Tahun 2021	11
II.1			
Tabel	Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun	11
II.2	2021		
Tabel	Klasifikasi Penilaian Pengukuran Capaian	14
III.1	Kinerja		
Tabel	Hasil Capaian Kinerja Sekretariat DPRD	14
III.2	Tahun 2021		
Tabel	Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun	14
III.3	2020 dan Tahun 2021		
Tabel	Capaian Kinerja dari Sasaran 1 Tahun	15
III.4	2021		
Tabel	Daftar Usulan Prolegd yang disetujui	16
III.5	DPRD Kabupaten Padang Pariaman Tahun		
	2021		
Tabel	Daftar Keputusan DPRD Kabupaten	16
III.6	Padang Pariaman Tahun 2021		
Tabel	Capaian Pelaksanaan Program Kegiatan	19
III.7	Tahun 2021 yang mendukung Sasaran I		
Tabel	Daftar Pelaksanaan Bimtek DPRD Tahun	23
III.8	2021		
Tabel	Daftar Pelaksanaan Reses Dapil DPRD	24
III.9	Kabupaten Padang Pariaman		
Tabel	Capaian Kinerja dari Sasaran 2 Tahun	25



III.10	2021		
III.11	Hasil rekapitulasi Kuisisioner Tingkat Kepuasan Layanan Sekretariat DPRD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2021	26
III.12	Capaian Pelaksanaan Program Kegiatan Tahun 2021 yang mendukung Pencapaian Sasaran 2	28
Tabel	Realisasi Anggaran Sekretariat DPRD	32
III.13	Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2021		



Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman memiliki komitmen yang kuat untuk mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil. Oleh karena itu, Sekretariat DPRD Kabupaten Padang Pariaman sebagai satuan kerja perangkat daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi untuk menyelenggarakan administrasi kesekretariatan DPRD, menyelenggarakan administrasi keuangan DPRD dan mendukung kinerja pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD ikut mempunyai peranan dalam mewujudkan komitmen tersebut diatas.

Untuk mewujudkan akuntabilitas dari pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang dipercayakan kepada Sekretariat DPRD Kabupaten Padang Pariaman atas penggunaan anggaran maka setiap tahunnya dituangkan dalam dokumen berupa Laporan Kinerja. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) disusun dengan berpedoman kepada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

A. GAMBARAN UMUM SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN PADANG PARIAMAN

Sekretariat DPRD Kabupaten Padang Pariaman merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah Urusan Pemerintahan Kesekretariatan DPRD yang dipimpin oleh seorang Sekretaris Dewan yang bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah dan merupakan salah

satu dari unit kerja yang ada dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Padang Pariaman. Sesuai Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 47 Tahun 2016 tentang Rincian Uraian Tugas Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten Padang Pariaman maka Sekretariat DPRD mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagai berikut :

1. Menyelenggarakan Administrasi Kesekretariatan DPRD,
2. Menyelenggarakan Administrasi Keuangan DPRD,
3. Menyelenggarakan Rapat-rapat DPRD
4. Fasilitasi Hubungan Kemasyarakatan
5. Penyediaan dan Pengkoordinasian Tenaga Ahli yang diperlukan oleh DPRD

a. TUGAS POKOK DAN FUNGSI SEKRETARIAT DEWAN

Sekretaris Dewan mempunyai tugas pokok menyelenggarakan administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, dan menyediakan serta mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah. Untuk melaksanakan tugas, Sekretaris Dewan mempunyai fungsi:

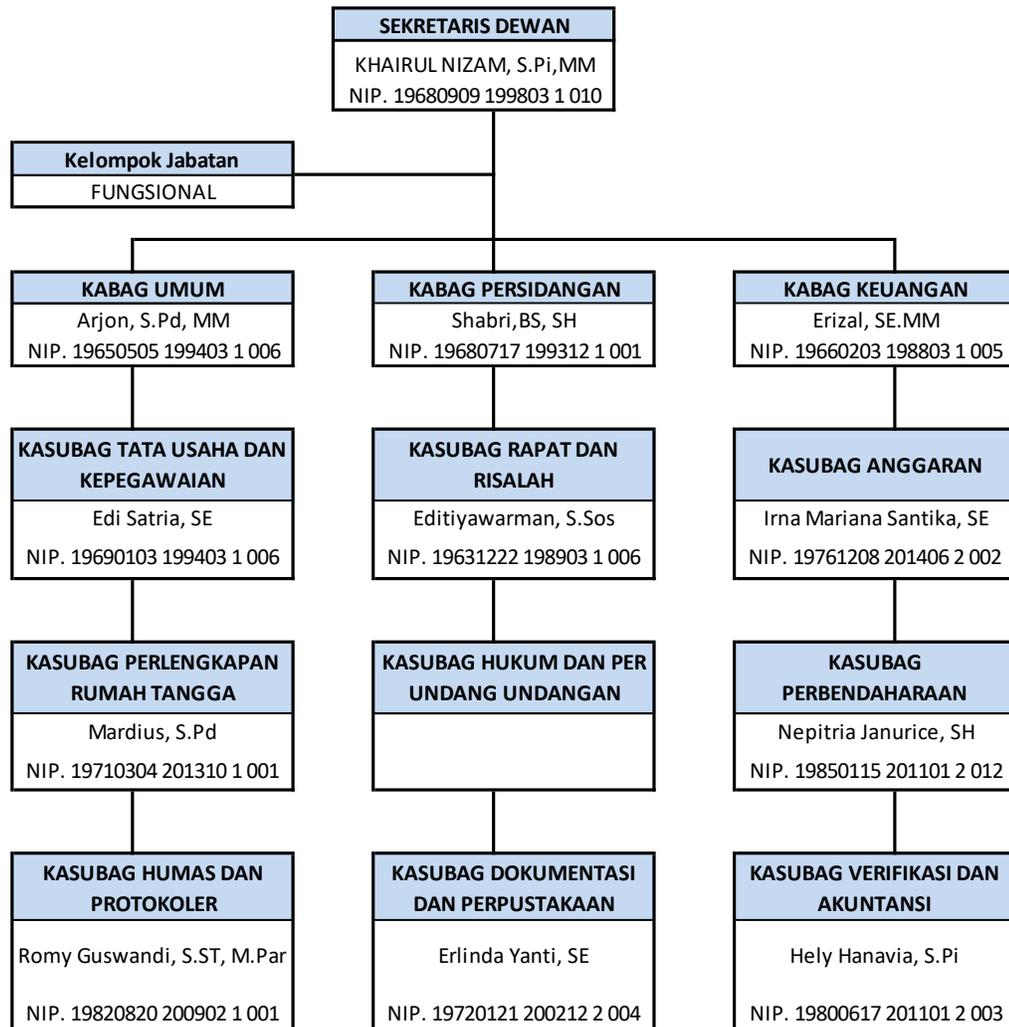
- a) penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD;
- b) penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD;
- c) penyelenggaraan sidang dan rapat-rapat DPRD;
- d) penyediaan dan pengkoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD; dan/atau
- e) pelaksanaan tugas dinas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

B. STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DPRD

Gambaran Struktur Organisasi, Struktur Jabatan serta Komposisi PNS Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Padang

Pariaman dapat dilihat seperti berikut ini :

Gambar I.1
Struktur Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Padang Pariaman



Sumber : Peraturan Bupati Kabupaten Padang Pariaman Nomor 47 Tahun 2016

Tabel I.1.
Struktur Jabatan Sekretariat DPRD menurut Esselonering

No.	NAMA JABATAN	ESELONERING			STAF
		ESELON II	ESELON III	ESELON IV	
1.	Sekretaris Dewan	1			
2.	Bagian Umum		1		4
3.	Bagian Keuangan		1		3
4.	Bagian Persidangan		1		6
5.	Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian			1	
6.	Sub Bagian Perlengkapan dan Rumah Tangga			1	
7.	Sub Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokoler			1	
8.	Sub bagian Rapat dan Risalah			1	
9.	Sub Bagian Hukum dan Perundang-Undangan			-	
10.	Sub Bagian Dokumentasi dan Perpustakaan			1	
11.	Sub Bagian Anggaran			1	
12.	Sub Bagian Verifikasi dan Akuntansi			1	
13.	Sub.Bagian Perbendaharaan			1	
J U M L A H		1	3	8	13

Sumber : Sekretariat DPRD Tahun 2021

B. PERMASALAHAN UTAMA YANG SEDANG DIHADAPI

Beberapa permasalahan utama yang dihadapi Sekretariat DPRD Tahun 2021 adalah:

1. Belum optimalnya dukungan SDM (jumlah dan kompetensi), Sarana Prasarana Sekretariat DPRD terhadap upaya Pemenuhan Kebutuhan Pendukung Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD yang difasilitasi oleh Sekretariat DPRD dalam rangka peningkatan kinerja DPRD
2. Belum optimalnya kinerja DPRD dalam pelaksanaan Tupoksinya
3. Masih rendahnya kualitas penyelenggaraan administrasi kesekretariatan dan administrasi keuangan DPRD
4. Masih lemahnya kualitas dan kuantitas koordinasi, integrasi, sinkronisasi tugas dan fungsi DPRD dengan lembaga pemerintahan daerah dan lembaga sosial kemasyarakatan lainnya

-
5. Perubahan peraturan perundangan, pedoman dan kebijakan yang berdampak penyusunan produk hukum daerah, tata tertib dan keuangan DPRD dan mekanisme pelaksanaan anggaran daerah
 6. Belum optimalnya kemampuan merencanakan kebutuhan penganggaran yang berbasis kinerja dari setiap program dan kegiatan yang direncanakan guna menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD
 7. Keterbatasan Anggaran Daerah untuk memenuhi semua kebutuhan DPRD mengharuskan Sekretariat DPRD harus jeli dan efektif dalam merencanakan kegiatan untuk memenuhi kebutuhan DPRD
 8. Dinamika Politik : adanya perbedaan pandangan dan perpecahan/dualisme yang dapat membuat banyak keputusan tidak bisa diambil yang dapat menghambat perencanaan dan pelaksanaan teknis administrasi
 9. Tuntutan penyelenggaraan pemerintahan yang lebih berbasis kinerja sesuai dengan Nawacita Presiden RI
 10. Masih kurangnya disiplin aparatur dan anggota DPRD
 11. Bercampurnya kepentingan politis dengan teknis terkadang dapat menghambat perencanaan dan pelaksanaan teknis administrasi

C. SISTEMATIKA PELAPORAN

Sistematika Penyusunan Laporan Kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2021, sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, adalah sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

Menginformasikan Gambaran Umum Sekretariat DPRD Kabupaten Padang Pariaman, menguraikan Permasalahan Utama Yang Dihadapi dan Sistematika Pelaporan.

Bab II Perencanaan Kinerja

Menguraikan ringkasan/ikhtisar Perjanjian Kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2020

Bab III Akuntabilitas Kinerja

A. Capaian Kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Padang Pariaman

Menyajikan capaian kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Padang Pariaman untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis Sekretariat DPRD Kabupaten Padang Pariaman sesuai dengan hasil pengukuran kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Padang Pariaman Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut :

- 1) Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini
- 2) Membandingkan antara target dan realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun lalu dan beberapa tahun terakhir
- 3) Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
- 4) Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan;
- 5) Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;
- 6) Analisis Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja;

B. Realisasi Anggaran

Diuraikan realisasi anggaran yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Padang Pariaman sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

Bab IV Penutup



Pada bab ini diuraikan kesimpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah dimasa mendatang yang akan dilakukan Sekretariat DPRD Kabupaten Padang Pariaman untuk meningkatkan kinerjanya.

Lampiran :

- 1) Perjanjian Kinerja
- 2) Lain-lain yang dianggap perlu



BAB II **PERENCANAAN KINERJA**

Sekretariat DPRD Kabupaten Padang Pariaman berupaya mengimplementasikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Padang Pariaman tahun 2016-2021 melalui Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat DPRD Kabupaten Padang Pariaman Tahun

2016-2021 dengan komitmen yang kuat. Implementasi Renstra Sekretariat DPRD pada Tahun 2021 merupakan tahun keenam dari periode Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2016-2021.

Untuk mencapai kinerja Sekretariat DPRD Tahun 2021, Sekretariat DPRD menyusun Perencanaan Kinerja Tahun 2021 dan menetapkan Perjanjian Kinerja Sekretariat DPRD Tahun 2021. Target-target kinerja Sekretariat DPRD Tahun 2021 telah menggambarkan Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2021 Sekretariat DPRD.

Berikut ini terdapat penjelasan ringkas mengenai Perencanaan Kinerja dan Perjanjian Kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2021

A. RENCANA STRATEGIS

Berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah dan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Nomor 54 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Sekretariat DPRD Kabupaten Padang Pariaman Maka Struktur Organisasi Seluruh Perangkat Daerah Berubah dan Seiring dengan ini Renstra OPD Pun Direvisi Sesuai Urusan yang Diembannya Begitu juga dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Padang Pariaman Sesuai Renstra 2016-2021 dapat diuraikan sebagai berikut :

1. VISI

Visi adalah pandangan yang jauh ke depan, kemana dan bagaimana organisasi/lembaga harus di bawa dan berkarya agar tetap konsisten dan eksis, antisipasi, dan inovatif, serta produktif. Visi merupakan suatu gambaran menantang tentang Keadaan di masa depan, berisi cita dan citra yang diwujudkan oleh instansi pemerintah.

Visi sebagai bagian dari perencanaan strategis, merupakan suatu langkah penting dalam perjalanan suatu organisasi. Kehidupan organisasi pemerintahan sangat dipengaruhi oleh perubahan lingkungan internal dan eksternal serta paradigma baru otonomi. Oleh karena itu visi organisasi harus mampu mengakomodasikan perubahan-perubahan yang terjadi tersebut.

Berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, Visi OPD Mengacu Pada Visi yang ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2016-2021 yaitu :

VISI :
Terwujudnya Kabupaten Padang Pariaman yang Baru, Religius ,
Cerdas dan Sejahtera”

Adapun makna Visi Pemerintah Daerah Kabupaten Padang Pariaman adalah :

➤ **BARU**

Baru memiliki arti sebagai sesuatu yang belum pernah ada sebelumnya. maka Kabupaten Padang Pariaman Baru dapat dimaknai sebagai keinginan untuk menjadi Kabupaten Padang Pariaman dalam bentuk belum pernah ada sebelumnya.

➤ **RELIGIUS**

Religius memiliki arti sebagai sesuatu yang bersifat religi, bersifat keagamaan dan yang bersangkutan-paut dengan religi. Artinya Kabupaten Padang Pariaman berkeinginan menjadi Kabupaten yang lebih religi.

➤ **CERDAS**

Cerdas memiliki arti sebagai sesuatu yang sempurna perkembangan akal budinya (untuk berpikir, mengerti, dan sebagainya) dan tajam pikiran. Artinya Kabupaten Padang Pariaman berkeinginan untuk mewujudkan masyarakat yang memiliki ketajaman pikiran.

➤ **SEJAHTERA**

Sejahtera memiliki arti sebagai sesuatu yang aman sentosa dan makmur, selamat (terlepas dari segala macam gangguan). Artinya Kabupaten Padang Pariaman memiliki tujuan untuk menjadi masyarakat Padang Pariaman yang sentosa, makmur dan selamat.

2. MISI

Misi Merupakan Tahapan-tahapan yang Harus Dilalui untuk Mencapai Sebuah Visi. Misi Mendeskripsikan Tentang Mengapa Sebuah Instansi Berada di Tengah Masyarakat. Dinas Sekretariat DPRD Kabupaten Padang Pariaman Mengemban Misi RPJMD.

Dalam Menjalankan Peran Sekretariat DPRD Dapat Dikaitkan Secara Khusus pada Pencapaian Misi ke-6 yaitu :

MISI KE 6 :
“Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik,
Berkeadilan, Demokratis Melalui Pembinaan Aparatur dan
Pelayanan Publik”

3. TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS TAHUN 2021

Tujuan dan sasaran strategis Sekretariat DPRD Kabupaten Padang Pariaman dapat diuraikan sebagai berikut :

Tabel II.1
Tujuan dan Sasaran Strategis Tahun 2021

MISI	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN
Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang efektif, bersih, berkeadilan, demokratis melalui penyelenggaraan pemerintah yang professional, aspiratif, partisipatif dan transparan	Terlaksananya Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Berdasarkan Prinsip Tata Kelola yang Baik	Persentase Produk Hukum Daerah	Meningkatnya Jumlah Produk Hukum Daerah	Persentase Capaian Prolegda
			Meningkatnya Kualitas Pelayanan Sekretariat DPRD	Persentase Tingkat Kepuasan Anggota DPRD

B. RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) TAHUN 2021

Guna mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi hasil dilingkungan Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman maka ditetapkan Peraturan Bupati Padang Pariaman tentang Perjanjian Kinerja dan Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2021 yang menjadi dasar Rencana Kerja Tahunan Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman pada Tahun 2021 termasuk untuk Sekretariat DPRD Kabupaten Padang Pariaman. IKU Sekretariat DPRD didukung oleh 1 Sasaran Strategis dengan 1 indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur keberhasilan program yang telah ditetapkan. Rencana Kinerja Tahunan Kinerja Sekretariat DPRD Tahun 2021, adalah sebagai berikut :

Tabel III.2
Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2021

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
INDIKATOR KINERJA UTAMA			
1.	Meningkatnya Jumlah Produk Hukum Daerah	Persentase Capaian Prolegda	100%
2.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Sekretariat DPRD	Persentase Tingkat Kepuasan Anggota DPRD	80%

C. PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian Kinerja yang merupakan komitmen kinerja antara Sekretaris DPRD Kabupaten Padang Pariaman dengan Bupati Padang Pariaman berdasarkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Perjanjian Kinerja dan Indikator Kinerja Utama Sekretariat DPRD Tahun 2021 beserta sasaran-sasaran strategis yang telah ditetapkan sebagai hasil (outcome) pelaksanaan program dan kegiatan Sekretariat DPRD akan dijadikan acuan untuk mengukur kinerja Sekretariat DPRD yang dituangkan dalam Laporan Kinerja. (Perjanjian kinerja terdapat dalam lampiran 1).



BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Sekretariat DPRD Kabupaten Padang Pariaman telah merealisasikan berbagai target-target kinerja sesuai dengan penetapan dalam dokumen Perjanjian Kinerja. Berikut ini diuraikan mengenai capaian kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Padang Pariaman selama Tahun 2021.

Uraian tersebut dengan penjelasan yang memadai dan disertai dengan argumentasi yang dapat dipertanggungjawabkan.

A. CAPAIAN KINERJA SEKRETARIAT DPRD

Pengukuran capaian kinerja Sekretariat DPRD Tahun 2021 dianalisis dan dievaluasi berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Pengukuran capaian kinerja merupakan perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Pengukuran kinerja ini dilakukan dengan menghitung pencapaian kinerja sasaran kegiatan dengan cara membandingkan antara rencana pencapaian kinerja yang telah dicapainya dalam rencana kerja tahunan dengan realisasi pencapaiannya dengan rumus :

$$Hasil = \frac{Realisasi}{Target Rencana} \times 100 \%$$

Klasifikasi Penilaian terkait capaian kinerja indikator kinerja utama dilakukan penilaian seperti tabel berikut :

Tabel III.1.
Klasifikasi Penilaian Pengukuran Capaian Kinerja

No	Klasifikasi Penilaian	Kategori
1	100% sd > 100%	Sangat Baik
2	90% sd < 100%	Baik
3	80% sd < 90%	Cukup Baik
4	60% sd < 80%	Sedang
5	0% sd < 60%	Gagal

Hasil capaian kinerja Sekretariat DPRD selama Tahun 2021, adalah sebagai berikut :

Tabel III.2
Hasil Capaian Kinerja Sekretariat DPRD Tahun 2021

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Satuan	Target	Realisasi	Capaian %	Interpretasi
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Meningkatnya Jumlah Produk Hukum Daerah	Persentase Capaian Prolegda	%	100%	100	100%	Sangat Baik
2.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Sekretariat DPRD	Persentase Tingkat Kepuasan Anggota DPRD	%	80%	76,30%	95,37%	Baik

Berdasarkan hasil capaian kinerja terhadap indikator kinerja utama, disimpulkan bahwa :

- 1) Pada indikator 1 dikategorikan "Sangat Baik",
- 2) Pada indikator 2 dikategorikan "Baik".

Tabel III.3
Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2020 dan Tahun 2021

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2020	Tahun 2021			
				Target	Realisasi	% Capaian	Kategori
1.	Meningkatnya Jumlah Produk Hukum Daerah	Persentase Capaian Prolegda	100%	100%	100%	100%	Sangat Baik
2.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Sekretariat DPRD	Persentase Tingkat Kepuasan Anggota DPRD	75%	80%	76,30%	95,37%	Baik

SASARAN 1
Meningkatnya Jumlah Produk Hukum Daerah

Pada Sasaran 1 yaitu Meningkatkan Jumlah Produk Hukum Daerah, telah dilaksanakan upaya-upaya yang direalisasikan dalam beberapa program dan kegiatan. Ukuran keberhasilan yang ditetapkan berupa indikator kinerja sebagai acuan penilaian dengan capaian kinerja dari sasaran ini seperti berikut :

Tabel III.4.
Capaian Kinerja dari Sasaran 1 Tahun 2021

No.	Indikator Kinerja	Tahun 2021			Kategori
		Target	Realisasi	% Capaian	
1	Persentase Capaian Prolegda	100%	100%	100%	Sangat Baik

Berdasarkan tabel diatas dapat dijelaskan sebagai berikut :

- a. Tahun 2021 Realisasi dari indikator ini adalah 100%.
- b. Berdasarkan capaian Tahun 2021 dapat diketahui bahwa pencapaian pada Indikator Kinerja 1 (satu) diperoleh hasil pencapaian dengan presentase 100% dengan hasil kategori “Sangat Baik”.
- c. Realisasi indikator ini pada Tahun 2021 mengalami penurunan jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2020 yaitu dari 110% menjadi 100% hal ini disebabkan karena pada tahun 2020 ada usulan tambahan Perda dari Prolegda yang diusulkan pada masa sidang II yaitu terkait dengan Ranperda RTRW yang harus ditetapkan secepatnya.
- d. Berdasarkan hasil kinerja DPRD Tahun 2021 ada sebanyak 6 Ranperda yang diusulkan dalam Prolegda yang disetujui DPRD :

Tabel III.5
Daftar Usulan Prolegda yang disetujui DPRD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2021

No	Usulan Ranperda sesuai Prolegda	Prolegda yang disetujui DPRD
1.	Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pelestarian Warisan Budaya dan Cagar Budaya;	√
2.	Rancangan Peraturan Daerah Tentang Restribusi Izin Usaha Perikanan;	√
3.	Rancangan Peraturan Daerah tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Padang Pariaman;	√
4.	Rancangan Peraturan daerah Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Derah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 8 Tahun 2012 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;	√
5.	Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 3 Tahun 2013 tentang Penyertaan Modal pada Bank Nagari;	√
6.	Rancangan Peraturan Daerah tentang Perumda Tirta Anai.	√

Tabel III.6
Daftar Keputusan DPRD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2021

No.	No. Surat Keputusan	Uraian Keputusan	Tanggal
1	01/KEP.P/DPRD/2021	Penyempurnaan dan Penyesuaian atas Ranperda Kabupaten Padang Pariaman tentang APBD Tahun 2021 dan Ranperbup Padang Pariaman tentang Penjabaran APBD Tahun 2021 Berdasarkan Evaluasi Gubernur Sumatera Barat	27 Januari 2021
2	02/KEP.P/DPRD/2021	Penyempurnaan Ranperda Kabupaten Padang Pariaman tentang Perubahan Atas Perda No 9 Tahun 2010 tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan	11 Februari 2021



		Batuan Berdasarkan Hasil Evaluasi Gubernur Sumatera Barat	
3	03/KEP.P/DPRD/2021	Pembentukan Tim Peninjau Ulang Tunjangan Perumahan dan Tunjangan Transportasi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Padang Pariaman	03 Mei 2021
4	04/KEP.P/DPRD/2021	Penyempurnaan Ranperda Kabupaten Padang Pariaman tentang Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang Berdasarkan Hasil Evaluasi Gubernur Sumatera Barat	28 Mei 2021
5	05/KEP.P/DPRD/2021	Penyempurnaan Ranperda Kabupaten Padang Pariaman tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2020 dan Ranperbup Padang Pariaman tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2020 Berdasarkan Hasil Evaluasi Gubernur Sumatera Barat	03 Agustus 2021
6	06/KEP.P/DPRD/2021	Penyempurnaan dan Penyesuaian Ranperda Kabupaten Padang Pariaman tentang RPJMD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2021-2026 Berdasarkan Hasil Evaluasi Gubernur Sumatera Barat	23 Agustus 2021
7	07/KEP.P/DPRD/2021	Penyempurnaan dan Penyesuaian atas Ranperda Kabupaten Padang Pariaman tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021 dan Ranperbup Padang Pariaman tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021 Berdasarkan Hasil Evaluasi Gubernur Sumatera Barat	19 Oktober 2021
8	08/KEP.P/DPRD/2021	Penyempurnaan dan Penyesuaian atas Ranperda Kabupaten Padang Pariaman tentang APBD Tahun Anggaran 2022 dan Ranperbup Padang Pariaman tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2022 Berdasarkan Hasil Evaluasi Gubernur Sumatera Barat	24 Desember 2021
9	01/KEP.D/DPRD/2021	Pengumuman Usul Pemberhentian Bupati dan Wakil Bupati Padang Pariaman Masa Jabatan 2016-2021	20 Januari 2021



10	02/KEP.D/DPRD/2021	Ranperda Penyertaan Modal Daerah Pada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Padang Pariaman	20 Januari 2021
11	04/KEP.D/DPRD/2021	Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2021	28 Januari 2021
12	06/KEP.D/DPRD/2021	5 (lima) Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman	01 April 2021
13	07/KEP.D/DPRD/2021	Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2021-2026	23 April 2021
14	08/KEP.D/DPRD/2021	Laporan Pertanggungjawaban Bupati Padang Pariaman Tahun 2020	27 Mei 2021
15	09/KEP.D/DPRD/2021	Tambahan Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2021	09 Juni 2021
16	10/KEP.D/DPRD/2021	Tambahan Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2021	09 Juni 2021
17	11/KEP.D/DPRD/2021	Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun Anggaran 2020	05 Juni 2021
18	12/KEP.D/DPRD/2021	Ranperda tentang Rencana RPJMD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2021-2026	03 Agustus 2021
19	13/KEP.D/DPRD/2021	Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2022	19 Agustus 2021
20	14/KEP.D/DPRD/2021	Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2022	19 Agustus 2021
21	15/KEP.D/DPRD/2021	Perubahan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2021	7 September 2021
22	16/KEP.D/DPRD/2021	Perubahan PPAS Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2021	7 September 2021
23	17/KEP.D/DPRD/2021	Ranperda Tentang Perubahan APBD Kabupaten Padang Pariaman Tahun Anggaran 2021	7 September 2021
24	19/KEP.D/DPRD/2021	Ranperda tentang APBD Kabupaten Padang Pariaman Tahun Anggaran 2022	23 November 2021



25	20/KEP.D/DPRD/2021	Ranperda Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2021	21 Desember 2021
----	--------------------	---	------------------

Keberhasilan pencapaian indikator ini ikut didukung dengan kerjasama dan upaya dalam melaksanakan administrasi kegiatan secara baik dan berkesinambungan dan adanya komitmen DPRD untuk ikut berpartisipasi dengan melakukan peningkatan kinerjanya.

Program/kegiatan yang menunjang pencapaian indikator kinerja ini melalui 1 (satu) program, 6 (enam) kegiatan dan 12 (dua belas) Sub Kegiatan.

Capaian Pelaksanaan Program dan Kegiatan Tahun 2021 seperti tabel dibawah ini :

Tabel III.7
Capaian Pelaksanaan Program Kegiatan Tahun 2021 Yang Mendukung Pencapaian Sasaran 1

No	Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Target 2021	Realisasi 2021
A	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Jumlah Ranperda Yang Dievaluasi Oleh Pihak Propinsi Untuk Diundangkan	8 Ranperda	6 Ranperda
		Persentase Keputusan DPRD yang ditindaklanjuti	100%	100%
		Persentase Persetujuan DPRD terhadap Ranperda APBD dan APBD Perubahan yang dilakukan tepat waktu	100%	100%
1	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Persentase Rapat Rapat Penyusunan Ranperda yang difasilitasi	100%	100%
		Jumlah Fasilitasi Peraturan DPRD yang dihasilkan	8 Keputusan	12 Keputusan
2	Pembahasan Kebijakan Anggaran	Persentase Pembahasan Kebijakan Anggaran tepat waktu yang difasilitasi	100%	100%
3	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Persentase Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan yang difasilitasi	80%	75%
4	Peningkatan Kapasitas DPRD	Persentase Kebutuhan Peningkatan Kapasitas DPRD yang difasilitasi	100%	100%



No	Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Target 2021	Realisasi 2021
5	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Persentase Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat oleh DPRD yang difasilitasi	100%	100%
6	Fasilitasi Tugas DPRD	Persentase Fasilitasi Koordinasi dan Konsultasi Tugas DPRD yang difasilitasi	84%	90%

12 (Dua Belas) Sub Kegiatan yang dilaksanakan yang mendukung pencapaian Sasaran I adalah sebagai berikut :

1. Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah



Pada kegiatan ini telah terlaksana fasilitasi terhadap rapat-rapat pembahasan Ranperda yang diajukan ke Bapemperda DPRD dengan kegiatannya berupa : penyediaan makan dan minum, pembayaran honorarium tenaga ahli fraksi, pembayaran uang saku rapat untuk pelaksanaan rapat pembahasan ranperda yang dilaksanakan di luar jam kantor, dan pembayaran sewa gedung ruang/tempat untuk pembahasan Ranperda sebanyak 4 (empat) kali.

Pada kegiatan ini telah terlaksana fasilitasi terhadap rapat-rapat pembahasan Ranperda pada tahun 2021 dengan hasilnya adalah disetujuinya 6 (Enam) Ranperda yang diusulkan.

2. Pembahasan KUA dan PPAS



Pada kegiatan ini telah terfasilitasi kegiatan Pembahasan KUA dan PPAS sebanyak 2 kali yaitu :

1. Pembahasan KUA dan PPAS Tahun 2022 tanggal pelaksanaan kegiatan 6 s/d 10 Agustus 2021.
2. Pembahasan KUPA dan PPAS Perubahan Tahun 2021 tanggal pelaksanaan kegiatan 1 s/d 5 September 2021.

3. Pembahasan APBD Tahun 2022



Pada kegiatan ini telah terfasilitasi kegiatan rapat-rapat Pembahasan APBD Tahun 2022 dengan dilaksanakan pada tanggal 12 s/d 16 November 2021

4. Pembahasan APBD Perubahan



Pada kegiatan ini telah terfasilitasi kegiatan rapat-rapat Pembahasan APBD Perubahan Tahun 2021 dilaksanakan pada tanggal 17 s/d 21 September 2021

5. Pembahasan Pertanggungjawaban APBD



Pada kegiatan ini telah terfasilitasi kegiatan rapat-rapat Pembahasan Pertanggungjawaban Tahun 2021 dan LKPJ Bupati Tahun 2021.

6. Pengawasan Penggunaan Anggaran



Telah terfasilitasi kegiatan Pengawasan Penggunaan Anggaran

melalui rapat Komisi bersama Mitra Kerja (OPD) dan Kunjungan Lapangan terkait pelaksanaan kegiatan ini.

7. Bimbingan Teknis DPRD

Telah terfasilitasinya kegiatan Bimbingan Teknis DPRD melalui kegiatan Bimbingan Teknis dan Waorkshop yang diikuti oleh Anggota DPRD sebanyak 5 (lima) kali selama Tahun 2021

Tabel III.8
Daftar Pelaksanaan Bimtek DPRD Tahun 2021

Uraian	Lokasi	Tanggal Pelaksanaan
Bimtek I	Hotel Rocky Padang	24 s/d 27 Februari 2021
Bimtek II	Pacific Palace Hotel Batam	22 s/d 25 Maret 2021
Bimtek III	Hotel Pangeran Beach	23 s/d 26 September 2021
Bimtek IV	Hotel Planet Holiday Jodoh Batam	27 s/d 30 Oktober 2021
Bimtek V	Hotel Rocky Padang	12 s/d 15 Desember 2021

8. Publikasi dan Dokumentasi Dewan

Telah terfasilitasinya kegiatan Publikasi dan Dokumentasi Dewan melalui Peliputan Kegiatan Pimpinan dan Anggota DPRD serta Pembuatan Kalender dan Buku Anggota DPRD yang dilaksanakan selama 1 tahun.

9. Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi

Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Fraksi di DPRD Kabupaten Padang Pariaman telah disediakan tenaga ahli fraksi sebanyak 8 orang untuk 8 Fraksi DPRD selama 1 tahun untuk mendukung pelaporan dan administrasi yang dilaksanakan oleh fraksi-fraksi

10. Pelaksanaan Reses

Telah terfasilitasinya kegiatan pelaksanaan Reses Anggota DPRD

sebanyak 3 (tiga) kali pada tahun 2021 dengan Jadwal sebagai berikut :

Tabel III. 9
Jadwal Pelaksanaan Reses Dapil DPRD Kabupaten Padang Pariaman

No	Uraian	Tanggal Pelaksanaan	Jumlah Anggota DPRD yang melaksanakan
1	Reses I	9 s/d 14 Maret 2021	40 Anggota DPRD
2	Reses II	12 s/d 15 Juli 2021	40 Anggota DPRD
3	Reses III	7 s/d 11 Oktober 2021	40 Anggota DPRD

11. Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD

Telah terfasilitasinya kegiatan Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD berupa konsultasi dan koordinasi alat Kelengkapan DPRD (Bamus, Banggar, Komisi/ Pansus, Badan Kehormatan, Bapemperda dan konsultasi Anggota DPRD lainnya) selama 1 tahun.

12. Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD

Telah terfasilitasinya kegiatan yang terkait pelaksanaan Tugas Pimpinan DPRD baik berupa Bimtek dan workshop ADKASI yang diikuti maupun koordinasi dan konsultasi 3 (tiga) pimpinan yang dilaksanakan selama tahun 2021.

Kendala dan Permasalahan yang dihadapi tahun 2021

Selama tahun 2021, Sekretariat DPRD telah melakukan fasilitasi terkait dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD secara optimal. Namun masih terdapat beberapa kendala yang masih harus diperbaiki. Beberapa permasalahan dan kendala adalah :

- Kondisi Sarana Prasarana Pendukung yang masih kurang memadai
- Kurang disiplinnya dari sebagian anggota DPRD dalam melaksanakan kegiatan kegiatan pada rapat-rapat
- Kurang disiplinnya anggota DPRD dalam menjalankan agenda yang telah ditetapkan oleh Badan Musyawarah DPRD

Sehingga untuk kedepannya solusi yang perlu diambil : Diharapkan kepada anggota DPRD untuk disiplin dan konsekwen dalam menjalankan agenda rapat- rapat dan kegiatan yang telah ditetapkan dan upaya melengkapi sarana parasarana yang dibutuhkan DPRD demi kenyamanan pelaksanaan kerja anggota DPRD dan tenaga pendamping dari Sekretariat DPRD.

SASARAN 2
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Sekretariat DPRD

Untuk meningkatkan kualitas Pelayanan Sekretariat DPRD, telah dilaksanakan upaya-upaya yang direalisasikan dalam beberapa program dan kegiatan. Ukuran keberhasilan yang ditetapkan berupa 1 indikator kinerja sebagai acuan penilaian dengan capaian kinerja dari sasaran ini seperti berikut :

$$\text{Hasil} = \frac{\text{Jum Anggota DPRD yg Puas Terhadap Pelayanan}}{\text{Jumlah Selur Anggota DPRD}} \times 100\%$$

Tabel III.10
Capaian Kinerja dari Sasaran 2 Tahun 2021

No.	Indikator Kinerja	Tahun 2021			
		Target	Realisasi	% Capaian	Kategori
1	Persentase Tingkat Kepuasan Anggota DPRD	80%	76,30%	95,37%	Baik

Berdasarkan tabel diatas dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Tahun 2021 Realisasi dari indikator ini adalah berdasarkan hasil kuesioner tingkat kepuasan Anggota DPRD yang dilaksanakan

dari 5 aspek bidang penilaian dan 27 indikator penilaian. Berdasarkan hasil rekapitulasi didapatkan hasil sebanyak 824 indikator penilaian menyatakan puas dan 256 indikator penilaian menyatakan tidak puas. Atau sebanyak 76,30% menyatakan puas terhadap tingkat pelayanan yang telah diberikan oleh Sekretariat DPRD.

2. Berdasarkan capaian Tahun 2021 dapat diketahui bahwa pencapaian 1 (satu) Indikator Kinerja diperoleh hasil pencapaian dengan presentase 95,37% dengan hasil kategori “Baik”.
3. Realisasi indikator ini pada Tahun 2021 mengalami kenaikan jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2020 yaitu dari 75% menjadi 76,30%.

Berikut ini Hasil Penilaian Tahun 2021

Tabel III.11

**Hasil Rekapitulasi Kuesioner Tingkat Kepuasan Layanan
Sekretariat DPRD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2021**

Dukungan Sumber Daya Manusia			
No	Pernyataan	Puas	Tidak Puas
1	Kompetensi dan profesionalisme PNS dalam memberikan dukungan layanan kepada Dewan.	35	5
2	Inisiatif, komunikasi, dan kerja sama PNS dalam memberikan dukungan layanan kepada Dewan.	34	6
3	Kecepatan penyiapan materi rapat, kualitas, ketepatan, dan kecepatan dalam menyiapkan dukungan administrasi persidangan (jadwal kegiatan, undangan, daftar hadir)	31	9
4	Kualitas, ketepatan, dan kecepatan dalam menyiapkan materi persidangan (skenario rapat untuk pimpinan, laporan singkat, draft kesimpulan)	33	7
5	Disiplin kerja (mengikuti peraturan, tepat waktu) dan kesediaan bekerja di luar jam kerja	30	10
6	Pelayanan ketepatan dan kecepatan dalam penyiapan rapat-rapat, seperti rapat internal komisi, rapat lainnya (selain persidangan)	32	8
7	Pelayanan dalam penyiapan konsumsi	31	9
Pelayanan Administrasi Perjalanan Dinas			
No	Pernyataan	Puas	Tidak Puas
8	Kecepatan dan ketelitian dalam proses penanganan permintaan penyiapan kelengkapan administrasi perjalanan dinas	32	8



9	Kecepatan dan ketelitian dalam proses pembuatan dokumen perjalanan dinas	29	11
10	Keramahan dan sikap akomodatif dalam pelayanan administrasi perjalanan	30	10
11	Penguasaan materi (peraturan terkait perjalanan dinas) dalam penyelesaian permasalahan perjalanan dinas	31	9
12	Kenyamanan dalam melaksanakan perjalanan dinas	33	7
13	Kecepatan dan kenyamanan untuk kesiapan daerah tujuan (koordinasi dengan daerah/instansi tujuan)	35	5
Penyediaan Sarana dan Prasarana			
No	Pernyataan	Puas	Tidak Puas
14	Kualitas Ruang Kerja Anggota (kelengkapan sarana dan prasarana)	28	12
15	Kualitas Ruang Rapat Paripurna dan Ruang Rapat AKD (kelengkapan sarana dan prasarana)	31	9
16	Kualitas sarana pendukung (toilet, taman, dan alat pendingin)	28	12
17	Keramahan, kecepatan, dan ketelitian petugas dalam merespons keluhan (di lingkungan Gedung DPRD)	28	12
Pelayanan Publik			
No	Pernyataan	Puas	Tidak Puas
18	Keramahan Petugas Front Office Kantor Sekretariat DPRD	26	14
19	Penyediaan Informasi terhadap tamu	25	15
20	Kecepatan dan Ketepatan pelayanan kepada tamu	32	8
21	Pelayanan atas penyampaian aspirasi kepada anggota DPRD	30	10
22	Penerimaan Aspirasi Masyarakat	29	11
23	Kecepatan atas tindak lanjut aspirasi masyarakat	30	10
Pelayanan Keuangan			
No	Pernyataan	Puas	Tidak Puas
24	Ketersediaan anggaran sesuai dengan kebutuhan	30	10
25	Kepuasan dalam memberikan informasi administrasi keuangan	32	8
26	Ketepatan waktu dalam hal pembayaran hak keuangan anggota DPRD	30	10
27	Pelayanan staf terhadap penyelesaian administrasi pertanggungjawaban keuangan	29	11
JUMLAH		824	256
PERSENTASE		76.30%	23.70%

Keberhasilan pencapaian indikator ini ikut didukung dengan kerjasama dan upaya dalam melaksanakan administrasi kegiatan secara baik dan berkesinambungan dan adanya komitmen dari Sekretariat DPRD untuk dapat melayani Anggota DPRD secara optimal.



Program/kegiatan yang menunjang pencapaian indikator kinerja ini melalui 1 (satu) program, 9 (sembilan) kegiatan dan 22 (dua puluh dua) Sub Kegiatan.

Capaian Pelaksanaan Program dan Kegiatan Tahun 2021 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel III.12
Capaian Pelaksanaan Program Kegiatan Tahun 2021 Yang Mendukung Pencapaian Sasaran 2

No	Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Target 2021	Realisasi 2021
A	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH/KABUPATEN/KOTA	Persentase Layanan Administrasi Keuangan dan Kesejahteraan DPRD Yang difasilitasi	100%	100%
		Persentase Layanan Administrasi Keuangan Aparatur Set. DPRD Yang difasilitasi	100%	100%
		Persentase Ketersediaan Sarana, Prasarana Penunjang dan Administrasi Umum DPRD yang difasilitasi	84%	84%
		Persentase Ketersediaan Sarana, Prasarana Penunjang dan Administrasi Umum Aparatur Set. DPRD yang difasilitasi	85%	85%
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Keselarasan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Perangkat Daerah	90%	90%
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Aparatur yang terpenuhi	100%	100%
3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Terpenuhinya Administrasi Kepegawaian dan Peningkatan Kapasitas Pegawai Perangkat Daerah	90%	50%
4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Terselenggara dan terpenuhinya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	100%
5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Tersedianya Sarana Prasarana Penunjang Kinerja Aparatur Perangkat Daerah	85%	85%
6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	100%
7	Pemeliharaan Barang Milik	Persentase Barang Milik	100%	100%



No	Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Target 2021	Realisasi 2021
	Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Daerah yang dipelihara		
8	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Persentase Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD yang dipenuhi	84%	70%
9	Layanan Administrasi DPRD	Persentase Layanan Administrasi DPRD yang dipenuhi	84%	100%

22 (Dua Belas) Sub Kegiatan yang dilaksanakan Tahun 2021 yang mendukung pencapaian Sasaran 2 adalah sebagai berikut :

1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

Kegiatan ini telah dilaksanakan dengan hasil tersedianya 6 dokumen yaitu : Renstra Sekretariat DPRD Tahun 2021-2026, Revisi Renstra 2016-2021, Renja Tahun 2022, RKA Tahun 2022, RKA Perubahan Tahun 2021, DPA Tahun 2022, DPA Perubahan Tahun 2021.

2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Kegiatan ini telah dilaksanakan dengan hasil tersedianya dokumen LPPD 2020, LAKIP 2020, Laporan Keuangan 2020 dan Laporan realisasi anggaran setiap bulannya.

3. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

Kegiatan ini telah dilaksanakan dengan hasil terbayarnya gaji dan tunjangan ASN di Sekretariat DPRD sebanyak 24 orang selama 14 Bulan (Gaji 12 bulan, Gaji 13 dan THR Gaji) serta pembayarn TPP selama 10 bulan

4. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN

Kegiatan ini telah dilaksanakan dengan terbayarnya honor pengelola keuangan selama 1 tahun (1 PA, 3 KPA, 1 PPK, 1 Bendahara Pengeluaran, 1 Bendahara Gaji, 1 Pengurus Barang, 3 Bendahara Pengeluaran, 8 PPTK)

5. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan

Kegiatan ini telah dilaksanakan, namun pelaksanaannya tidak optimal karena ada beberapa kegiatan ASDEKSI diakhir tahun dibatalkan karena pandemic Covid 19

6. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor



Kegiatan ini telah dilaksanakan dengan hasil tersedianya alat-alat listrik kantor.

7. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Kegiatan ini telah dilaksanakan dengan hasil tersedianya peralatan untuk menunjang sarana prasarana untuk anggota DPRD maupun Sekretariat DPRD.

8. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan

9. Fasilitasi Kunjungan Tamu

Kegiatan ini telah dilaksanakan dengan hasil terdeianya makan minum baik untuk tamu yang datang berkunjung maupun untuk rapat-rapat internal di sekretariat DPRD selama 1 tahun

10. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Kegiatan ini telah dilaksanakan untuk mendukung rapat-rapat koordinasi dan konsultasi yang dilakukan baik ke luar daerah maupun di dalam daerah selama satu tahun.

11. Pengadaan Mebel

Kegiatan ini telah dilaksanakan dengan hasil terlaksananya pengadaan mebel dan pembelian kursi dan meja pejabat untuk Sekretaris DPRD dan Pimpinan DPRD serta pengadaan lemari arsip sebanyak 2 unit.

12. Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Kegiatan ini telah dilaksanakan dengan hasil terdeianya Alat Tulis Kantor, Cetak, penggandaan, perangko dan materai selama tahun 2021.

13. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Kegiatan ini telah dilaksanakan dengan hasil terbayarnya tagihan listrik kantor, rumah dinas, taguhan air dan internet rumah dinas pimpinan DPRD selama tahun 2021

14. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

Kegiatan ini telah dilaksanakan dengan hasil terbayarnya jasa tenaga kerja non pegawai pada kantor Sekretariat DPRD sebanyak 40 orang yang merupakan tenaga pramubakti, sopir, sespri, dan ajudan pimpinan serta tenag kebersihan kantor dan rumah dinas ketua DPRD selama 1 tahun.



15. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

Pada kegiatan ini telah dilaksanakan pemeliharaan terhadap kendaraan dinas/operasional berupa biaya service, penggantian suku cadang, pembelian bahan bakar minyak dan pembayaran pajak kendaraan pada Sekretariat DPRD sesuai dengan kebutuhan anggaran selama 1 tahun.

16. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Kegiatan ini melaksanakan pemeliharaan peralatan dan mesin kantor, seperti pemeliharaan AC, kompter, printer, tabung racun api, dan lain-lain selama 1 tahun.

17. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

Telah dilaksanakan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya sesuai dengan anggaran yang tersedia selama 1 tahun.

18. Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD

Pada kegiatan ini telah terpenuhinya pembayaran gaji dan tunjangan Pimpinan dan Anggota DPRD serta terpenuhinya dana operasional Pimpinan DPRD selama 1 tahun.

19. Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD

Kegiatan ini melaksanakan Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Pimpinan dan Anggota DPRD yang terdiri dari 2 (dua) stel Pakaian Dinas Harian (PDH) dan 2 (dua) stel Pakaian Sipil Harian (PSH).

20. Pelaksanaan Medical Check Up DPRD

Kegiatan ini tidak terlaksana sehubungan dengan masih berjalannya pandemic Covid 19.

21. Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD

Kegiatan ini melaksanakan Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD seperti, Rapat Paripurna Acara Tertentu selama 1 tahun.

22. Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD

Pada kegiatan ini telah dilaksanakan Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD sesuai dengan kebutuhan anggaran selama 1 tahun.

B. REALISASI ANGGARAN



Program dan kegiatan serta alokasi anggaran untuk mencapai prioritas urusan wajib yang dilaksanakan selama Tahun 2021 pada Sekretariat DPRD Kabupaten Padang Pariaman meliputi:

Tabel III.6
Realisasi Anggaran Sekretariat DPRD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2021

No	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%	Capaian Program/ Kegiatan
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	6.127.186.234	5.803.670.412	94,72	Persentase Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah kabupaten/Kota dengan persentase capaian sebesar 94,72%
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	65.808.000	61.327.250	93,19	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan persentase realisasi rata-rata sebesar 93,19%
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	26.330.000	25.231.250	95,83	Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah dengan persentase realisasi sebesar 95,83%
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	39.478.000	36.096.000	91,43	Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dengan persentase realisasi sebesar 91,43%
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.520.983.269	2.488.418.632	98,71	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dengan persentase realisasi rata-rata sebesar 98,71%
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.332.463.269	2.311.118.632	99,08	Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN dengan persentase realisasi sebesar 99,08%
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	188.520.000	177.300.000	94,05	Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN dengan persentase realisasi sebesar 94,05%
3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	57.200.000	5.980.000	10,45	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah dengan persentase realisasi rata-rata 10,45%
	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	57.200.000	5.980.000	10,45	Kegiatan Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan dengan persentase realisasi sebesar 10,45%
4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	563.924.125	554.235.000	98,28	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah dengan persentase realisasi rata-rata 98,28%
	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	34.998.125	34.922.450	99,78	Kegiatan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor dengan persentase realisasi sebesar 99,78%
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	405.673.000	404.393.000	99,68	Kegiatan Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor dengan persentase realisasi sebesar 99,68%



	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	0	0	0	Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan dengan persentase realisasi sebesar 0%
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	23.419.000	23.304.600	99,51	Kegiatan Fasilitasi kunjungan tamu dengan persentase realisasi sebesar 99,51%
	Penyelenggaraan Rapat Kordinasi dan Konsultasi SKPD	99.834.000	91.614.950	91,77	Kegiatan Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD dengan persentase realisasi sebesar 91,77%
5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	121.300.000	98.505.000	81,21	Kegiatan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah dengan persentase realisasi rata-rata sebesar 81,21%
	Pengadaan mebel	121.300.000	98.505.000	81,21	Kegiatan pengadaan mebel dengan persentase realisasi sebesar 81,21%
6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.289.043.440	1.267.659.989	98,34	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan persentase realisasi rata-rata sebesar 98,34%
	Penyediaan jasa surat menyurat	56.970.650	56.863.800	99,81	Kegiatan Penyediaan jasa surat menyurat dengan persentase realisasi sebesar 99,81%
	Penyediaan Jasa Komunkikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	143.400.000	136.719.686	95,34	Kegiatan Penyediaan Jasa Komunkikasi, Sumber Daya Air dan Listrik dengan persentase realisasi sebesar 95,34%
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.088.672.790	1.074.076.500	98,66	Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor dengan persentase realisasi sebesar 98,66%
7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	785.872.700	686.314.461	87,33	kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan persentase realisasi rata-rata sebesar 87,33%
	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorang dinas atau kendaraan dinas jabatan	129.879.700	128.925.534	99,27	Kegiatan Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorang dinas atau kendaraan dinas jabatan dengan persentase realisasi sebesar 99,27%
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	156.625.000	138.595.550	88,49	Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya dengan persentase realisasi sebesar 88,49%
	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	499.368.000	418.793.377	83,86	Kegiatan Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya dengan persentase realisasi sebesar 83,86%
8	Layanan Administrasi DPRD	723.054.700	641.230.183	88,68	Kegiatan Layanan Administrasi DPRD dengan persentase realisasi rata-rata sebesar 88,68%

	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	723.054.700	641.230.183	88,68	Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD dengan persentase realisasi sebesar 88,68%
II	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	37.742.791.223	35.245.865.232	93.38	Persentase Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD dengan persentase capaian sebesar 93,38%
9	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	78.610.000	33.715.000	42,89	Kegiatan Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD dengan persentase realisasi rata-rata sebesar 42,89%
	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	78.610.000	33.715.000	42,89	Kegiatan Pembahasan rancangan peraturan daerah dengan persentase realisasi sebesar 42,89%
10	Pembahasan Kebijakan Anggaran	891.668.000	880.492.250	98,75	Kegiatan Pembahasan Kebijakan Anggaran dengan persentase realisasi rata-rata sebesar 98,75%
	Pembahasan KUA dan PPAS	436.781.000	436.350.500	99,90	Kegiatan Pembahasan KUA dan PPAS dengan persentase realisasi sebesar 99,90%
	Pembahasan APBD	236.454.000	226.118.750	95,63	Kegiatan Pembahasan APBD dengan persentase realisasi sebesar 95,63%
	Pembahasan APBD Perubahan	218.433.000	218.023.000	99,81	Kegiatan Pembahasan APBD Perubahan dengan persentase realisasi sebesar 99,81%
	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	0	0	0	Kegiatan Pembahasan Pertanggungjawaban APBD dengan persentase realisasi sebesar 0%
11	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	36.320.000	18.880.000	51,98	Kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan dengan persentase realisasi rata-rata sebesar 51,98%
	Pengawasan pengguna anggaran	36.320.000	18.880.000	51,98	Kegiatan Pengawasan pengguna anggaran dengan persentase realisasi sebesar 51,98%
12	Peningkatan Kapasitas DPRD	2.410.352.000	2.165.352.210	89,84	Kegiatan Peningkatan Kapasitas DPRD dengan persentase realisasi rata-rata sebesar 89,84%
	Pendalaman Tugas DPRD	1.955.133.000	1.755.871.000	89,81	Kegiatan Bimbingan teknis DPRD dengan persentase realisasi sebesar 89,81%
	Publikasi dan Dokumentasi Dewan	199.819.000	195.881.210	98,03	Kegiatan Publikasi dan Dokumentasi Dewan dengan persentase realisasi sebesar 98,03%
	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	255.400.000	213.600.000	83,63	Kegiatan Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi dengan persentase realisasi sebesar 83,63%

13	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	626.972.000	560.695.900	89,43	Kegiatan Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat dengan persentase realisasi rata-rata sebesar 89,43%
	Pelaksanaan Reses	626.972.000	560.695.900	89,43	Kegiatan Pelaksanaan Reses dengan persentase realisasi sebesar 89,43%
14	Fasilitasi Tugas DPRD	15.522.516.275	14.901.983.805	96,00	Kegiatan Fasilitasi Tugas DPRD dengan persentase realisasi rata-rata sebesar 96,00%
	Kordinasi dan konsultasi pelaksanaan Tugas DPRD	14.251.949.275	13.646.999.805	95,76	Kegiatan Kordinasi dan konsultasi pelaksanaan Tugas DPRD dengan persentase realisasi sebesar 95,76%
	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	1.270.567.000	1.254.984.000	98,77	Kegiatan Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD dengan persentase realisasi sebesar 98,77%
15	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	17.317.657.648	15.939.254.220	92,03	Kegiatan Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD dengan persentase realisasi sebesar 92,03%
	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan	16.987.852.648	15.631.574.220	92,01	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan persentase realisasi sebesar 92,01%
	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	308.000.000	307.680.000	99,90	Kegiatan Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD persentase realisasi sebesar 99,90%
	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	21.805.000	0	0	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD persentase realisasi sebesar 0%
16	Layanan Administrasi DPRD	856.945.300	745.491.847	86,99	Kegiatan Layanan Administrasi DPRD dengan persentase realisasi rata-rata sebesar 86,99%
	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	856.945.300	745.491.847	86,99	Kegiatan fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD dengan persentase realisasi sebesar 86,99%
Jumlah		43.869.977.457	41.049.535.744	93,57	

A. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Pada Tahun 2021 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota terdapat 8 (delapan) Kegiatan dan 17 (tujuh belas) Sub Kegiatan dengan Pagu Anggaran sebesar Rp. 6.127.186.234,00 dan Realisasi Anggaran sebesar Rp. 5.803.670.412,00 persentase sebesar 94,72%.

B. PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD

Pada Tahun 2021 Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD



ini terdapat 8 (delapan) Kegiatan dan 15 (lima belas) Sub Kegiatan dengan Pagu Anggaran sebesar Rp. 37.742.791.223,00 dan Realisasi Anggaran sebesar Rp. 35.245.865.232,00 persentase sebesar 93,38%.



A. Kesimpulan

- a) Faktor utama penentu berbagai keberhasilan yang sudah dicapai sepanjang Tahun 2021 ini adalah adanya komitmen dan dukungan Pimpinan serta berbagai pihak yang berkepentingan, selain itu walaupun secara kuantitas sangat terbatas dukungan kemampuan personil yang memadai juga menjadi salah satu penentu keberhasilan pencapaian Kinerja di Tahun 2021 ini.
- b) Permasalahan yang dihadapi pada tahun 2021 terutama masih kurang cermat dalam penyusunan anggaran untuk beberapa kegiatan, pengumpulan data kinerja, pencatatan. Serta permasalahan eksternalnya yaitu dengan adanya pandemi COVID 19 yang masih berkelanjutan, sehingga pada tahun ini banyak kegiatan yang tidak mencapai target dan adanya kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan dikarenakan pengalihan anggaran untuk penanggulangan pandemi COVID 19 tersebut.
- c) Capaian Kinerja Sekretariat DPRD selama tahun 2021 pada kedua indikator kinerja adalah :

Persentase Capaian Prolegda adalah 100% kriteria “Sangat Baik”, pada tahun 2021 dengan Ranperda yang diusulkan sebanyak 6 (enam) Ranperda.

Persentase Tingkat Kepuasan Anggota DPRD adalah sebanyak 76,30% dengan kriteria “Baik”, menyatakan puas terhadap tingkat pelayanan yang telah diberikan oleh Sekretariat DPRD.
- d) Realisasi Anggaran Sekretariat DPRD selama tahun 2021 dari Anggaran Rp. 43.869.977.457,- yang dapat terealisasi sebesar Rp. 41.049.535.744,-, dengan Persentase Realisasi Anggaran sebesar 93,57%, mengalami peningkatan dari tahun 2020 dengan persentase Realisasi Anggaran 92,30%. Dengan capaian kinerja pada tahun ini, diharapkan akan mengalami peningkatan di tahun berikutnya.

B. Langkah kedepan

1. Dalam upaya untuk meningkatkan kinerja Sekretariat DPRD pada tahun mendatang, beberapa langkah strategis yang akan dilakukan melalui pelaksanaan program :
 - a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Daerah Kabupaten/Kota
 - b. Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD
2. Merencanakan kegiatan selama satu tahun dengan efektif dan efisien, sehingga kegiatan dapat dilaksanakan sesuai dengan anggaran yang ada.

Akhir kata, kami beserta segenap aparatur Sekretariat DPRD mengharapkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Sekretariat DPRD Tahun 2021 dapat memenuhi kewajiban untuk menyampaikan akuntabilitas kinerja dan sebagai sumber informasi penting dalam pengambilan keputusan dan pertanggungjawaban kinerja baik kepada Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman, maupun kepada masyarakat.

Demikian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Sekretariat DPRD Tahun 2021 yang merupakan gambaran dari keseluruhan program Sekretariat DPRD Tahun 2021.

Pariaman, 07 Januari 2022
Sekretaris DPRD

KHAIRUL NIZAM, S.Pi, MM
NIP. 19680909 199803 1 010

